

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **A. PERMASALAHAN PROPINSI DKI JAKARTA**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya bersifat kompleks, mendalam dan kait-mengait sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Permasalahan tersebut menjadi lebih luas lagi setelah terjadinya krisis multi-dimensional empat tahun terakhir. Pada dasarnya, masalah Propinsi DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam dua hal, (1) masalah kota yang tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional secara keseluruhan bahkan menjadi bagian dari masalah nasional, dan (2) masalah kota yang bersifat khas dan menonjol dan hanya menjadi masalah serius di daerah perkotaan khususnya Propinsi DKI Jakarta.

Adapun masalah kota Jakarta yang menjadi bagian dari masalah nasional adalah: (1) masih terjadinya konflik sosial politik, (2) masih lemahnya penegakan hukum, (3) kebebasan tak terkendali dan unjuk kekuatan-anarkis, (4) lambatnya pemulihan ekonomi daerah, (5) masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, dan (6) belum memadainya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah.

Lebih lanjut masalah khas dan menonjol yang dihadapi Jakarta dalam jangka menengah ini adalah: (1) masih terjadinya ancaman bahaya banjir, (2) belum tertanganinya secara baik sampah kota, (3) belum tertibnya lalu lintas kota, (4) meningkatnya pedagang K-5 dan PMKS, (5) belum optimalnya peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan (6) keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan hidup kota.

## B. ARAH KEBIJAKAN

Perjalanan pembangunan Propinsi DKI Jakarta mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Hingga tahun 1997, Propinsi DKI Jakarta mengalami masa pertumbuhan semu, artinya suatu ekspansi pertumbuhan berdasarkan fundamental ekonomi yang lemah terutama ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang sangat besar (*loan-based economy*). Konsep pembangunan pada waktu itu adalah ekspansi pembangunan infrastruktur dan ekonomi berbasis pinjaman dan dominasi pusat.
- b. Periode 1998-2000, masa resesi ekonomi dan krisis multi-dimensional, dimana sebagian pranata dan aktivitas ekonomi terhenti karena beban yang terlalu besar. Program utama yang dijalankan adalah penerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan perbaikan infrastruktur demokrasi, disebut juga *Rescue Program*.
- c. Periode 2001, masa penyembuhan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dengan program utama perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung bergeraknya kembali roda perekonomian Propinsi DKI Jakarta, disebut juga *Rescue-Recovery Program*.
- d. Periode 2002-2004, masa pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, penegakkan supremasi hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama perbaikan infrastruktur sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, disebut juga *Recovery Program*.
- e. Periode 2005-2007, masa pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dengan program utama penguatan fundamental sosial dan ekonomi menuju pada kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan, disebut juga *Stabilization Program*.

Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI

Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya, dapat dirumuskan arah dan kebijakan umum pembangunan Propinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan, sebagai berikut:

### **1. Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, 2002-2007**

- a. Periode 2003-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.
- b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi termasuk peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan.

### **2. Pokok Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, 2002-2007**

- a. Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah
- d. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan
- e. Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk
- f. Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan

- g. Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat
- h. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran masa
- i. Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar
- j. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, konsumsi dan aktivitas yang kurang ramah lingkungan
- k. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota

### **C. ARAH KEBIJAKAN MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN**

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi DKI Jakarta 2002-2007 membagi bidang pembangunan kedalam 8 bidang yaitu; bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa, bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi, bidang Pendidikan dan Kesehatan, bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, bidang Sosial Budaya, bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta bidang Sarana dan Prasarana Kota. Masing-masing bidang memiliki program daerah yang ditetapkan berdasarkan prospek, peluang dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta perkembangan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat Jakarta.

#### **1. BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA**

- a. Permasalahan dan Arah Kebijakan

Kondisi penegakan hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta walaupun mulai mendapat perhatian dari semua pihak tetapi belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Oleh karenanya perlu segera dilakukan langkah-langkah inventarisasi terhadap Perda-Perda yang diprioritaskan dan sangat mendesak untuk dilakukan revisi. Sementara itu penciptaan rasa aman di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kejahatan, baik jumlah maupun kualitasnya relatif meningkat dan terjadi hampir di semua wilayah. Keadaan ini makin diperburuk dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum masih pada tingkat yang belum memadai.

Euforia demokrasi yang terus bergulir telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali dimana rambu-rambu hukum terus diabaikan, sementara yang dijadikan andalan adalah unsur kekuatan. Dalam kehidupan nyata, masih dijumpai adanya konflik sosial dan tawuran masa yang sangat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Propinsi DKI Jakarta. Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum berada pada titik yang sangat rendah. Kondisi ini menyulitkan posisi pemerintah daerah dalam penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum dan perwujudan budaya hukum serta penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting. Upaya yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menciptakan citra kehidupan yang tertib, disiplin, nyaman dan damai perlu dilaksanakan, melalui langkah-langkah efektif, koordinatif dalam rangka terciptanya supremasi hukum di segala bidang. Selain itu dengan telah dibentuknya Dewan Kelurahan, hendaknya dapat lebih diberdayakan, dalam rangka penyebarluasan produk hukum dan memberikan penerangan hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Rukun Warganya masing-masing.

Diharapkan pula aparat Tramtib dalam melaksanakan kegiatan operasional di lapangan dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab, tegas, disiplin

serta selalu berpegang teguh kepada koridor hukum/atura-aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari tindakan yang berakibat pada pelanggaran HAM. Disamping itu perlu dijalin kerjasama/koordinasi yang lebih terencana dan komprehensif antara Dinas Tramtib dengan aparat keamanan beserta jajarannya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

#### b. Program Pembangunan

1. Pengembangan peraturan perundang-undangan daerah
2. Peningkatan kesadaran hukum
3. Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
5. Peningkatan peranserta masyarakat dalam tramtibmas dan penanggulangan bencana
6. Peningkatan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran
7. Pengembangan sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana
8. Pemantapan integrasi bangsa dan HAM
9. Pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan

## **2. BIDANG PEMERINTAHAN**

#### a. Permasalahan dan Arah Kebijakan

Reformasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang menghendaki perubahan total pada sikap dan perilaku aparat pemerintahan daerah baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perangkat yang dimiliki Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang belum optimal.

Pertama, kelembagaan dan ketatalaksanaan belum bekerja secara efisien dan efektif, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas.

Kedua, kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai dan hal ini tentunya menyangkut pula masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab, bahkan penerapan "*reward and punishment*". Disamping itu sistem pengujian "*fit and proper, intelligence quotient, dan emotional quotient*" perlu lebih ditingkatkan dalam pengisian jabatan di birokrasi. Upaya memangkas jalur birokrasi masih perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar berlangsung efisien, efektif, murah dan cepat.

Ketiga, prasarana dan sarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu, pemeliharaan dan rasa memiliki prasarana dan sarana pada sebagian aparatur masih kurang. Dengan demikian secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mampu memenuhi: (1) penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien, (2) fungsi pelayanan publik yang optimal, serta (3) penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam hal fungsi pengawasan, perlu adanya peningkatan kualitas terhadap SDM bagi aparatur pengawas, baik dari segi peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian (*skill*) maupun dari segi integritas moral serta dedikasi pribadi yang baik, dalam rangka menegakkan supremasi hukum khususnya penanganan KKN di lingkungan Pemda Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya setiap pimpinan unit kerja dituntut memiliki kreativitas dan gagasan yang inovatif dalam melaksanakan kepemimpinannya, sehingga akan menghindari sifat atau kebiasaan bahwa pelaksanaan tupoksi merupakan pelaksanaan rutinitas. Di dalam struktur eselonisasi pada jajaran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mulai dari eselon IV ke atas, setiap pejabatnya belum secara optimal melakukan pengawasan secara melekat kepada bawahannya,

sehingga berimplikasi terhadap kurang optimalnya setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perhatian juga perlu diberikan pada pengelolaan aset-aset daerah terutama tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan kebijakan pertanahan yang berkeadilan. Untuk itu perlu diupayakan penjagaan dan pengawasan secara kontinyu, termasuk upaya pengamanan serta penertiban secara tegas sejak awal, sehingga aset daerah tidak dikuasai oleh pihak-pihak lain yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Di sisi lain kegiatan penerangan, komunikasi dan media massa hendaknya lebih diarahkan pada penyebaran informasi yang lebih merata, sehingga dengan adanya informasi yang akurat dan berkualitas, maka kebijakan pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdampak positif terhadap partisipasi warga masyarakat dalam menunjang pembangunan di Propinsi DKI Jakarta.

#### b. Program Pembangunan

1. Pengembangan otonomi daerah
2. Pengembangan pemerintahan tingkat propinsi  
Pengembangan pemerintahan tingkat kotamadya :
3. Pengembangan pemerintahan Jakarta Pusat
4. Pengembangan pemerintahan Jakarta Utara
5. Pengembangan pemerintahan Jakarta Barat
6. Pengembangan pemerintahan Jakarta Selatan
7. Pengembangan pemerintahan Jakarta Timur
8. Pengembangan pemerintahan Kepulauan Seribu
9. Penataan Administrasi Pertanahan
10. Pengembangan SDM aparatur
11. Peningkatan administrasi kepegawaian
12. Pendidikan dan pelatihan aparatur

13. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan
14. Pengembangan perencanaan dan pengendalian rencana
15. Penelitian dan pengembangan
16. Peningkatan pengawasan fungsional
17. Peningkatan kerjasama antar daerah
18. Peningkatan perbendaharaan daerah
19. Peningkatan administrasi keuangan daerah
20. Peningkatan penerimaan daerah
21. Peningkatan administrasi dan pengelolaan aset daerah
22. Pengembangan statistik daerah
23. Pengembangan teknologi informasi
24. Peningkatan pengelolaan arsip dan dokumentasi
25. Pengembangan kehumasan dan keprotokolan
26. Pemetaan dan informasi pertanahan

### **3. BIDANG EKONOMI**

#### **a. Permasalahan dan Arah Kebijakan**

Meskipun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi. Selain itu lambatnya pemulihan ekonomi juga disebabkan oleh berbagai faktor di luar ekonomi seperti belum stabilnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, masih lemahnya penegakan hukum, masih terjadinya perseteruan antar elit politik yang kesemuanya kurang memberi iklim kondusif pada pemulihan ekonomi.

Lambatnya pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Disamping itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada kelompok usia kerja. Penciptaan lapangan kerja baru masih terbentur pada stagnasi aktivitas ekonomi terutama dialami oleh usaha skala besar. Dalam keadaan ini, diakui usaha kecil dan menengah (UKM) telah menjadi katup pengaman dari membengkaknya angka pengangguran, bahkan UKM tetap hidup dan berkembang di saat krisis sekalipun. Untuk itu perhatian pemerintah dalam menumbuhkembangkan UKM perlu terus ditingkatkan. Aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas mereka seperti kebutuhan modal, sarana dan prasarana ekonomi publik, tata ruang, teknologi, bahan baku dan pemasaran, perlu dikemas dalam suatu kebijakan yang integratif dan menyeluruh. Padahal fakta menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan kerja berada di sektor ini dan hanya memperoleh bagian kecil dari kue Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan.

Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sesungguhnya potensi ekonomi Propinsi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi oleh propinsi-propinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya perikanan, industri, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ekonomi ini dipadukan dengan pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.

Upaya penataan juga masih perlu terus dilaksanakan terhadap pedagang kaki lima yang berusaha pada lokasi-lokasi strategis dan badan jalan. Perlu disiapkan peraturan yang dapat menjaga agar kelangsungan usaha tersebut tidak mengganggu ketertiban umum, termasuk kelancaran lalu lintas. Pembinaan juga perlu ditingkatkan terhadap para pedagang di pasar tradisional maupun

para pelaku pengusaha kecil, menengah dan koperasi baik dalam kemudahan permodalan maupun dalam kemampuan mengelola usahanya.

Dalam hal pengembangan industri pariwisata perlu diupayakan suatu sistem yang mampu mengarahkan pelaksanaan pengembangan produk dan pemasaran yang lebih terintegrasi, terukur serta mampu secara efektif meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Untuk itu masih perlu ditingkatkan sinergi antara pengembangan produk di satu pihak dan promosi di lain pihak, serta koordinasi instansi terkait yang mendukungnya.

Dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan jasa sebagai pilar utama perekonomian Propinsi DKI Jakarta perlu selalu dikaitkan dengan kehidupan dan kepentingan perekonomian rakyat, baik dalam hal pembangunan sumberdaya manusianya, pembinaan dan manajemen serta peningkatan kualitas produk barang dan jasa menuju daya saing yang lebih baik. Untuk itu penguatan basis ekonomi melalui jaringan produksi dan distribusi serta jaringan antar pelaku menjadi komponen penting dalam pengembangan ketiga sektor ini.

Dalam hal pengembangan pertanian, perlu dipertimbangkan kondisi lahan yang sempit, sehingga perlu ditekankan pada sistem pertanian perkotaan yang lebih cocok dan pengembangan agribisnis. Demikian juga untuk peternakan, pemenuhan kebutuhan akan hewan ternak perlu ditingkatkan termasuk usaha pengolahan hasil ternak beserta ikutannya. Disamping itu, pengaturan, pengendalian *supply* dan *demand* serta pengembangan standarisasi produk, pengujian mutu dan sertifikasi atas produk serta kesehatan masyarakat veteriner, perlu diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan konsumen. Dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup, pelestarian hutan bakau/mangrove, dan hutan lindung, serta restrukturisasi dan refungsionalisasi kehutanan perlu mendapat perhatian.

Akhirnya penataan ekonomi daerah juga akan terkait dengan kesiapan Propinsi DKI Jakarta menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Pasar bebas ASEAN (AFTA) sudah akan diberlakukan efektif mulai tahun 2003

dan pasar bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2020. Sebagai pintu gerbang utama Indonesia, Jakarta harus lebih siap dibanding kota-kota lain, apalagi Jakarta ingin memainkan peranannya sebagai kota jasa (*Service City*). Produk barang dan jasa yang dihasilkan harus lebih berkualitas dan bersaing, bahkan Jakarta harus menjadi laboratorium bagi pengembangan produk-produk dalam negeri berkualitas. Untuk itu pengembangan dan penguasaan teknologi dan perilaku pelayanan prima bagi semua elemen ekonomi yang ada harus menjadi terobosan baru dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat.

#### b. Program Pembangunan

1. Pengembangan produk pariwisata
2. Pengembangan pasar pariwisata
3. Pengembangan sarana dan pelayanan pariwisata
4. Penataan, penguatan basis industri dan perdagangan
5. Penataan, pengembangan produk industri dan perdagangan
6. Penataan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan
7. Pengembangan ekspor
8. Penataan dan restrukturisasi usaha daerah (PD/BUMD)
9. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan usaha swasta lain
10. Pemberdayaan aset daerah
11. Penataan kaki lima dan usaha skala mikro
12. Pemberdayaan UKM dan koperasi
13. Pengembangan kewirausahaan
14. Pengembangan lembaga keuangan mikro

15. Pengembangan produksi peternakan dan perikanan
16. Penataan distribusi hasil peternakan dan perikanan
17. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut
18. Pengembangan produksi, pemasaran pertanian dan kehutanan
19. Pengembangan hutan

#### **4. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

##### **a. Permasalahan dan Arah Kebijakan**

Krisis ekonomi, membengkaknya pengangguran dan merosotnya pendapatan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya keluarga yang tidak dapat lagi membiayai pendidikan putra-putrinya terutama pada pendidikan tingkat SLTA ke atas. Akibatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah semakin besar dan mereka terpaksa bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, yang sangat kontra-produktif dengan program wajib belajar 9 tahun.

Di dunia pendidikan sendiri, keadaannya juga belum mendukung tercapainya proses belajar-mengajar yang lebih baik. Walaupun tidak sedikit dari pelajar yang berprestasi baik, tetapi sesungguhnya masih banyak kasus-kasus tawuran pelajar yang menjurus pada tindak kriminal. Ini menyebabkan pendidikan dan proses belajar-mengajar seakan-akan menjadi kurang bermakna. Muatan kurikulum yang berorientasi pada penguatan akhlak dan moral serta pendidikan agama perlu ditingkatkan dalam hal praktek dan implementasi, sehingga tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Akibatnya dunia pelajar masih kurang memiliki kepekaan yang cukup untuk membina dan mengembangkan sikap toleransi dan kebersamaan dalam perbedaan. Dilain pihak guru sebagai profesi yang memikul tanggung jawab yang berat untuk mendidik siswa agar menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara juga perlu mendapat perhatian terutama dalam hal kesejahteraannya. Dunia pendidikan juga menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai

subsistem dalam mempersiapkan SDM yang lebih berkualitas untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dengan demikian, bidang pendidikan memerlukan perhatian serius dan menyeluruh, agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan 9 tahun bahkan 12 tahun sekaligus menata kembali sistem manajemen pendidikan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.

Di bidang kesehatan, golongan masyarakat yang kurang mampu, karena pendapatan dan kesejahteraan yang rendah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada kesehatannya. Disamping itu lingkungan perumahan yang tidak sehat, sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit. Ketidakmampuan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup serta tingkat pengetahuan gizi yang rendah juga mempengaruhi ketidakmampuan dalam pemenuhan gizi pada sebagian masyarakat. Fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang menyangkut Puskesmas, RSUD dan penanganan gawat darurat, agar pelayanan kesehatan dapat merata melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mutu yang makin baik.

Masalah menonjol lainnya di bidang kesehatan adalah terbatasnya fasilitas pelayanan penanganan dan penerapan sanksi hukum penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) terutama di kalangan remaja. Masalah ini menjadi serius karena kecenderungan semakin meluasnya penggunaan narkoba yang mengancam masa depan generasi muda.

#### b. Program Pembangunan

1. Pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar
2. Pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS)

3. Pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan
4. Pengendalian dan peningkatan informasi perguruan tinggi
5. Pengembangan perpustakaan
6. Peningkatan kesehatan masyarakat
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Penanganan gawat darurat
9. Perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan

## **5. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**

### **a. Permasalahan dan Arah Kebijakan**

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan, termasuk penerapan *law enforcement* serta pengendalian penduduk harus makin ditingkatkan dengan menggunakan teknologi maju, apabila Propinsi DKI Jakarta tidak ingin menjadi

wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup perkotaan yang semakin berkurang.

Di bidang ketenagakerjaan, persoalan utama yang dihadapi adalah belum seimbangny penediaan lapangan kerja (karena terbatasnya *economic scale*) dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi, itupun sebagian sudah ditampung ke dunia kerja melalui sektor informal. Persoalan kedua adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan sebagian merupakan pendatang (kaum urban) dengan pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai.

#### b. Program Pembangunan

1. Pengendalian kependudukan
2. Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
3. Pengembangan kesempatan kerja
4. Perlindungan dan pengendalian tenaga kerja
5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

### 6. BIDANG SOSIAL BUDAYA

#### a. Permasalahan dan Arah Kebijakan

Bidang sosial budaya mencakup aspek yang sangat luas meliputi aspek kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, seni budaya, permuseuman dan pemugaran, serta olahraga dan kepemudaan. Namun demikian dalam banyak hal berbagai aspek ini saling kait-mengait yang memerlukan penanganan secara terintegrasi.

Beragamnya masyarakat yang tinggal di Propinsi DKI Jakarta dapat menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersifat primordial dan partisan. Sebagian dari mereka terutama akar rumput (*grass-root*) sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi menjadi perkelahian masal antar warga

masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebab yang sangat sederhana.

Kekeliruan dalam memahami dan mengimplementasikan demokrasi belakangan ini telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali dimana sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan berpotensi menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat Jakarta masih harus menjadi perhatian.

Masalah sosial lainnya yang timbul dari krisis ekonomi dan sulitnya lapangan kerja adalah semakin banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebagian dari mereka adalah para pengamen, pedagang di lampu lalu lintas, pengemis dan anak jalanan yang memerlukan perhatian dan pertolongan di satu sisi tetapi juga dibutuhkan ketegasan dalam penanganannya di lain pihak, karena berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba juga semakin bertambah. Tugas penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh agama, para pemuka masyarakat dan para pembina masyarakat di tingkat lokal. Pembinaan keagamaan perlu makin ditingkatkan agar dapat tercapai keseimbangan dalam kehidupan, termasuk meningkatnya kerukunan hidup beragama. Untuk itu peranan Forum Antar Umat Beragama perlu ditingkatkan kegiatannya hingga tingkat kelurahan, sehingga terjalin kebersamaan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama. Di bidang keluarga sejahtera, dirasakan masih belum membudayanya Keluarga Berencana di tengah masyarakat, dimana ke depan diharapkan kesadaran masyarakat makin meningkat untuk membangun keluarga yang berkualitas dan mandiri.

Perhatian pemerintah pada masalah olahraga dan pemuda juga masih perlu ditingkatkan. Sarana olahraga untuk masyarakat umum masih sangat tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Dengan mengarahkan kegiatan

pemuda pada olahraga akan terbentuk sumber daya pemuda yang sehat, tangguh dan produktif serta mampu menghindarkan penggunaan waktu luang pada kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan masyarakat. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan peranan perempuan juga perlu ditingkatkan, termasuk upaya memberikan pemahaman yang benar pada makna kesetaraan dan keadilan jender serta pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*).

Di bidang kesenian dan kebudayaan kebijakan pengembangan yang integratif dan sinerjik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan budaya Betawi serta budaya daerah lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pariwisata daerah. Pembinaan dan pengembangan seni budaya lain yang berkembang seperti museum dan gedung-gedung bersejarah, juga perlu mendapatkan perhatian untuk pengkayaan budaya.

#### b. Program Pembangunan

1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama
2. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
4. Peningkatan peranserta sosial masyarakat
5. Peningkatan pelayanan pemakaman
6. Peningkatan ketahanan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
7. Pemberdayaan masyarakat kelurahan
8. Pemberdayaan perempuan
9. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan
10. Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan cagar budaya/sejarah
11. Pengawasan pemugaran
12. Peningkatan peran kepemudaan dan pramuka

13. Peningkatan prestasi olahraga
14. Pembinaan olahraga masyarakat

## **7. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **a. Permasalahan dan Arah Kebijakan**

Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding masyarakat lainnya di Indonesia, telah menjadi penyebab pada dua persoalan besar berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan hidup, yaitu (1) Jakarta terlalu boros mengkonsumsi produk yang berasal dari SDA seperti, BBM dan air tanah, (2) pola dan perilaku konsumtif pada masyarakat dan dunia bisnis cenderung kurang bersahabat (*friendly*) pada lingkungan hidup, sehingga pencemaran Jakarta sudah pada ambang yang sangat serius.

Beberapa catatan di bawah ini menunjukkan kerisauan sebagian besar masyarakat pada masalah SDA dan lingkungan hidup di Jakarta: (1) terus berlangsungnya peningkatan konsumsi BBM tanpa upaya penghematan serta kesadaran yang rendah pada pemanfaatan energi alternatif, (2) meningkatnya produksi sampah kota dan belum tersedianya pola penanganan yang efektif dan efisien, (3) bahaya banjir tetap mengancam setiap tahun, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan sistem drainase yang kurang baik, (4) Jakarta sangat polutif dan merupakan kota ketiga di dunia yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

Untuk masalah diatas, berbagai upaya perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik melalui pembangunan ruang terbuka hijau (taman dan penghijauan), peningkatan kegiatan prokasih, prodasih dan program langit biru, termasuk sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai kepentingan vital kali bersih sebagai sumber air baku. Perlu dibangun Balai Bibit atau memperluas areal pembibitan untuk penghijauan yang telah ada selama ini, yang menyediakan berbagai bibit, baik bibit tanaman hias, pelindung maupun buah-buahan yang bermutu baik. Terhadap penanganan sampah yang selama ini dilakukan, perlu dicarikan alternatif teknologi

penanganan persampahan lain yang berbasis pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Persoalan yang dihadapi seperti disebutkan di atas, juga menjadi sorotan dunia, dan upaya pemecahannya tidak cukup hanya dibebankan pada pemerintah daerah saja, tetapi juga memerlukan perhatian dan kesadaran, baik dunia usaha maupun masyarakat luas.

b. Program Pembangunan

1. Pengembangan sumber daya pertambangan dan energi
2. Pengembangan sumber air tanah
3. Peningkatan kualitas lingkungan
4. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan
5. Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Penyerasian dan Keindahan Lingkungan
7. Pengembangan sarana dan prasarana kebersihan
8. Peningkatan pelayanan kebersihan

## **8. BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA**

a. Permasalahan dan Arah Kebijakan

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah: (1) belum berhasilnya penataan permukiman kumuh, (2) bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi langganan, (3) belum tertanganinya masalah sampah, (4) belum memadainya fasilitas jalan, jembatan layang dan trotoar, (5) masih buruknya sistem transportasi umum, (6) belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan, (7) masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik, dan (8) belum optimalnya penerangan jalan umum terutama di pinggiran kota.

Mengatasi permasalahan banjir, disamping terus mengupayakan pembangunan sistem makro penanganan banjir dan mengoptimalkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada, upaya mengatasi banjir pada daerah-daerah langganan banjir tetap menjadi perhatian utama. Bersamaan dengan itu juga masih perlu ditingkatkan upaya pemisahan antara saluran air baku dan air limbah.

Permasalahan transportasi yang dihadapi di Jakarta adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Disamping itu dengan telah ditetapkannya Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten Administrasi maka tingkat pelayanan angkutan penumpang dan barang perlu dikembangkan. Untuk memelihara kinerja sistem angkutan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal, maka selain pembangunan infrastruktur baru, diperlukan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang ada, perbaikan manajemen lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum. Upaya-upaya kearah pembangunan sistem angkutan umum masal (MRT) harus tetap menjadi perhatian walaupun tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, untuk itu perlu dikembangkan solusi interim melalui penerapan sistem *busway*.

Disamping penyediaan prasarana dan sarana pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab publik juga dituntut untuk ikut memelihara prasarana dan sarana yang ada. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat memiliki perilaku merusak perlu mendapat perhatian dalam rangka penegakan hukum. Kasus-kasus seperti pengrusakan telepon umum, taman kota, pagar pembatas jalan dan corat-coret dinding mudah dijumpai dimana-mana. Dengan kata lain, pemanfaatan fasilitas publik belum optimal karena masyarakat belum memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) yang cukup.

#### b. Program Pembangunan

1. Pembangunan prasarana jaringan utilitas
2. Penerangan jalan dan tempat umum
3. Peningkatan sarana keindahan kota

4. Pengembangan pelayanan air limbah
5. Pengembangan pelayanan air bersih
6. Pengendalian banjir
7. Peningkatan drainase kota
8. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan
9. Pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan
10. Pengembangan pelayanan angkutan umum
11. Pengembangan perumahan
12. Penataan lingkungan permukiman
13. Peningkatan pelayanan perumahan dan permukiman
14. Perencanaan ruang
15. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
16. Penataan dan pengawasan bangunan
17. Pengembangan kawasan khusus/strategis
18. Penataan bangunan gedung Pemda